

Refocussing Apbd Kota Surabaya 2020 Dalam Penanganan COVID-19

M. Zimamul Khaq^{1*}, Syukran Revaldi², M. Yusuf³

¹⁻³UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Article Info: Accepted: 15 Mei 2024; Approve: 25 Mei 2024; Published: 31 Mei 2024

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Refocussing APBD Kota Surabaya 2020 Dalam Penanganan Covid-19, dimana walikota Surabaya melakukan kebijakan refocussing anggaran 2020 sebesar 136M untuk penanganan covid-19. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah 1) Bagaimana Efektivitas Refocussing APBD Kota Surabaya 2020 dalam Penanganan Covid-19? 2) Apa dampak refocussing APBD kota Surabaya 2020 dalam penanganan covid-19? Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas. Menurut Mahmudi efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Dengan menggunakan deskriptif kuantitatif dengan analisis data. Hasil penelitian ini adalah 1) Tingkat efektivitas refocussing APBD 2020 untuk penanganan covid-19 pada tiga bulan pertama pada awal penyebaran covid-19 (April-Juni) tingkat efektivitasnya diatas 100% sehingga kriterianya tergolong tidak efektif, ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien positif covid-19 dan rasio efektivitas setiap bulannya. Pada tiga bulan terakhir (September-November 2020) terjadi jumlah penurunan pasien dan tingkat efektivitas secara berturut-turut yaitu 63,53%, 73,38% (keduanya tergolong efektif) dan 59,93% (sangat efektif) pada bulan November 2020. Adapun dampak refocussing APBD kota Surabaya 2020 dalam penanganan covid-19 antara lain: Program pembangunan infrastruktur yang tertunda, Tingkat pengangguran terbuka meningkat, Melemahnya daya beli masyarakat dikarenakan pendapatan masyarakat yang turun, Ekonomi melemah pada segala tingkatan.

Kata Kunci: Efektivitas; Kebijakan; Refocussing.

Abstract: This research discusses the effectiveness of refocusing the 2020 Surabaya City APBD in handling Covid-19, where the mayor of Surabaya implemented a policy of refocusing the 2020 budget of 136 billion for handling Covid-19. This research has two problem formulations 1) What is the effectiveness of refocusing the 2020 Surabaya City APBD in handling Covid-19? 2) What is the impact of refocusing the 2020 Surabaya City APBD in handling Covid-19? This research uses Effectiveness theory. According to Mahmudi, effectiveness is the relationship between output and goals, the greater the contribution of output to achieving goals, the more effective the organization, program or activity. Effectiveness focuses on outcomes. By using quantitative descriptive with data analysis. The results of this research are 1) The level of effectiveness of refocusing the 2020 APBD for handling Covid-19 in the first three months at the beginning of the spread of Covid-19 (April-June) the level of effectiveness was above 100% so that the criteria were classified as ineffective, marked by an increase in the number of positive Covid-19 patients. 19 and effectiveness ratio every month. In the last three months (September-November 2020), there was a decrease in the number of patients and the level of effectiveness respectively, namely 63.53%, 73.38% (both classified as effective) and 59.93% (very effective) in November 2020. The impacts of refocusing the 2020 Surabaya City APBD in handling Covid-19 include: Delayed infrastructure development programs, Increased open unemployment rate, Weakening people's purchasing power due to falling people's incomes, Weakening economy at all levels.

Keywords: Effectiveness; Policy; Refocusing.

Correspondence Author: M. Zimamul Khaq

Email: zimamulkhaq@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan Covid-19 (*Corona Virus Disease*) adalah sebuah virus atau wabah penyakit yang mempunyai karakteristik sangat cepat penyebarannya di antara manusia, diyakini pertama kali muncul di kota Wuhan China pada bulan November 2019, hingga April 2020 telah menyebar ke 210 negara (Valerisha, et al., 2020). Sedangkan Pemerintah Indonesia pertama kalinya mengumumkan dua kasus pasien positif covid-19 pada 2 Maret 2020. Virus jenis ini penularannya sangat cepat, sehingga Pemerintah menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional. Status tersebut diumumkan pada tanggal 14 Maret 2020 oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo di Gedung BNPB, sehingga diperlukan anggaran yang besar untuk penanggulangan bencana nasional tersebut karena anggaran adalah komponen paling utama dari perencanaan dan pengendalian (Grediani & Sugiri, 2010). Anggaran yang berkaitan dengan sektor publik, dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/Daerah (APBN/D), Perubahan APBD merupakan program yang dilakukan secara rutin oleh Pemerintah Daerah, sebagai upaya untuk menjalankan penyesuaian yang terjadi (Kurniawan & Arza, 2019)

Anggaran APBN 2020 dan APBD 2020 yang sudah disetujui oleh legislatif, tentunya tidak mengalokasikan dana untuk program penanganan virus corona, karena virus ini merupakan bencana nasional yang datangnya tiba-tiba, sehingga perlu dilakukan *refocussing* anggaran untuk penanggulangannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai dengan Ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan *Refocussing* terhadap APBD 2020 yang sudah disetujui bersama legislatif untuk penanganan bencana nasional tersebut. *Refocussing* ini dilakukan dengan pemotongan belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50%, pemotongan belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dan penyesuaian belanja pegawai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang penyesuaian Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai:

1. Belanja Bidang Kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
2. Penyediaan Jaring Pengamanan Sosial/*Social Safety Net*; dan
3. Penanganan Dampak Ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup.

Pengalokasian *Refocussing* anggaran disesuaikan dengan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri No.1 Tahun 2020 tentang *refocussing* dan realisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Besaran alokasi *refocussing* APBD Kota Surabaya sebesar 136 Miliar difokuskan pada sektor kesehatan, alokasi *refocussing* APBD Provinsi sebesar 49 Miliar difokuskan pada top up program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan sektor kesehatan berupa alat pelindung diri (APD), masker N95. Sedangkan alokasi *refocussing* anggaran sebesar 552 Miliar dari APBN difokuskan pada sektor kesehatan dan sektor Jaring Pengaman Sosial. Sektor kesehatan berupa alat pelindung diri (APD), masker N95 dan sektor Jaring Pengaman Sosial berupa program Keluarga Harapan (PKH), program sembako bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Presiden dan Kemensos, bantuan sosial tunai (BST), Pemkot Surabaya juga mendapatkan dana CSR pihak ketiga sebesar 60 Miliar ditambah pelayanan rapid dan swab test dari BIN dan BPNPB sebesar 20 Miliar sehingga total dana *refocussing* kota Surabaya sebesar 819 Miliar dan diharapkan dapat menekan laju penularan virus corona di masyarakat.

Berdasarkan data-data diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas kebijakan anggaran *refocussing* tersebut dengan judul *Refocussing* APBD Kota Surabaya 2020 Dalam Penanganan *Covid-19*. Rumusan masalah yang akan jadi fokus peneliti untuk dijawab selama proses penelitian adalah 1). Bagaimana efektivitas kebijakan *refocussing* APBD kota Surabaya 2020 dalam penanganan covid-19? 2). Apa dampak *refocussing* APBD kota Surabaya 2020 dalam penanganan covid-19?.

Kajian Teori

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan, sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2002:132), efektivitas mengacu pada taraf penilaian hasil. Dalam pengertian yang lebih sederhana, apabila tujuan pemerintah daerah atau kota dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, seperti dalam konteks pemenuhan kebutuhan penanganan COVID-19, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif. Efektivitas dalam hal ini berfokus pada pencapaian hasil yang sesuai dengan harapan.

Sedangkan menurut Mahmudi (2019:86), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif pula organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Hal ini berarti bahwa efektivitas menitikberatkan pada outcome, yaitu hasil akhir yang dicapai dari suatu kegiatan. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dilihat dari pelaksanaan program, tetapi juga pada bagaimana hasil tersebut mendekati atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Permendagri No.13/2006, efektivitas diartikan sebagai pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan keluaran (output) dengan hasil (outcome). Jika hasil yang dicapai melebihi target, maka program tersebut dapat dianggap sangat efektif. Begitu juga sebaliknya, jika hasil yang dicapai tidak memenuhi target, maka efektivitas program tersebut perlu ditinjau kembali.

Melanjutkan pada gambaran umum demografis Kota Surabaya, jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 2.970.730 jiwa, tersebar di 31 wilayah kecamatan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, dengan persentase penduduk perempuan sebesar 50,38% dan penduduk laki-laki sebesar 49,62%. Persebaran penduduk tertinggi ada di Kecamatan Tambaksari, sedangkan yang terendah di Kecamatan Gayungan. Selain itu, komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan jumlah terbesar, menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki potensi produktivitas yang tinggi.

Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan juga menunjukkan distribusi yang signifikan. Sebagian besar penduduk memiliki pendidikan SMA/ sederajat, diikuti oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Adapun pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -5,97%, yang disebabkan oleh penyesuaian data dengan program Satu Data Kementerian Dalam Negeri.

Dalam hal refocussing anggaran, perubahan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 yang berfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Refocussing anggaran ini menunjukkan pentingnya perencanaan keuangan yang adaptif dalam menghadapi situasi darurat. Anggaran dalam hal ini berfungsi sebagai alat perencanaan, pengawasan, dan koordinasi agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai secara efektif.

Efektivitas dalam konteks ini tidak hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang telah dikeluarkan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dapat memberikan hasil yang nyata dalam pencapaian tujuan penanganan COVID-19.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dalam konteks ini, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan efektivitas kebijakan refocussing APBD 2020 dalam penanganan COVID-19. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan korelasi, yang bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiyono (2015), penelitian korelasi mempelajari hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan dalam penelitian ini

fokusnya adalah pada posisi fiskal dan kondisi keuangan Kota Surabaya serta sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan daerah berkontribusi dalam penanganan COVID-19.

Penelitian ini mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya pada tahun 2020. Unit analisis yang digunakan adalah pengelolaan keuangan daerah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang berupa laporan realisasi jumlah pasien terpapar COVID-19, yang diperoleh langsung dari sumber terkait, serta data sekunder yang diperoleh melalui media perantara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung melalui pertanyaan, sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengkaji catatan atau dokumen pemerintah, seperti laporan jumlah pasien terpapar COVID-19 setiap bulan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif. Peneliti menampilkan angka-angka, menganalisis data menggunakan rasio, serta menyajikan gambar atau tabel yang menggambarkan dan menjelaskan kondisi riil di lapangan. Dalam analisis ini, fokus utamanya adalah pada efektivitas pengelolaan anggaran refocussing yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.

Teknik analisis efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung rasio perbandingan antara realisasi dan target. Rasio efektivitas dirumuskan sebagai perbandingan antara realisasi dan target yang dicapai, dalam hal ini terkait jumlah pasien positif COVID-19 yang bersifat negatif, dengan penggunaan stimulus anggaran refocussing Kota Surabaya. Melalui teknik ini, tingkat efektivitas dalam pengendalian penyebaran virus diukur dan dinilai untuk melihat sejauh mana kebijakan refocussing anggaran berhasil menekan angka kasus COVID-19 di Kota Surabaya

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya yang diperoleh dari Humas Bappeko Surabaya, Pemkot Surabaya pada tahun 2020 merealisasikan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp. 7.545.200.048.928,-, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 8.032.680.988.065,-. Dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, Pemkot Surabaya melakukan refocussing anggaran sebesar Rp. 136.246.514.992,- yang bersumber dari APBD, dan difokuskan pada sektor kesehatan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan. Meskipun kontribusi anggaran dari Pemkot Surabaya hanya sebesar 3% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencapai Rp. 4.289.743.347.125,-, namun anggaran ini diperkuat dengan dana tambahan dari pihak ketiga, yaitu APBN sebesar Rp.

552,8 M, APBD Provinsi Jatim sebesar Rp. 49,6 M, serta kontribusi masyarakat dan CSR sebesar Rp. 60 M. Dengan demikian, total anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19 di Surabaya mencapai Rp. 819 M, yang mencakup sekitar 20% dari total PAD Kota Surabaya, memungkinkan pemerintah untuk lebih maksimal dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.

Anggaran sebesar Rp. 819 M ini digunakan untuk berbagai keperluan penanganan COVID-19, termasuk pembelian alat pelindung diri (APD), masker untuk masyarakat, penyemprotan disinfektan, serta sektor Jaring Pengaman Sosial melalui program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), dan pelayanan rapid serta swab test dari BIN dan BNPB. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penggunaan anggaran refocussing ini dalam menekan penyebaran COVID-19, digunakan data realisasi jumlah pasien positif COVID-19 serta target pengendalian virus. Dalam analisis ini, semakin kecil persentase yang dicapai, semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan anggaran refocussing untuk pengendalian COVID-19.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Daerah, pada tiga bulan pertama awal penyebaran COVID-19 (April–Juni), efektivitas kebijakan anggaran refocussing masih tergolong tidak efektif, dengan tingkat efektivitas di atas 100%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19, yang terbukti dengan banyaknya warga yang enggan memakai masker dan tetap berkerumun di tempat-tempat umum tanpa menjaga jarak. Puncak kasus terjadi pada Juni 2020, dengan jumlah pasien mencapai 3.320 orang, menyebabkan Surabaya dikategorikan sebagai zona merah tua. Pemkot Surabaya merespons dengan mengadakan tes swab dan rapid test massal, serta menempatkan warga yang dinyatakan positif tanpa gejala di Hotel Asrama Haji.

Pada bulan Juli 2020, jumlah pasien COVID-19 mulai melandai dengan 2.876 kasus, dengan tingkat efektivitas yang cukup efektif sebesar 86,63%. Namun, pada bulan Agustus 2020, jumlah pasien kembali meningkat menjadi 3.447, dengan tingkat efektivitas yang tergolong tidak efektif sebesar 119%. Selanjutnya, pada tiga bulan berikutnya (September–November), terjadi penurunan jumlah pasien dengan tingkat efektivitas berturut-turut sebesar 63,53% pada bulan September, 73,38% pada bulan Oktober, dan tingkat efektivitas yang sangat efektif sebesar 59,93% pada bulan November. Meskipun jumlah pasien sedikit meningkat pada bulan Desember menjadi 1.266, tingkat efektivitas kembali turun menjadi 131,46%. Secara keseluruhan, kebijakan refocussing anggaran di Surabaya dinilai efektif dalam menekan penyebaran COVID-19, terutama pada periode September hingga November, di mana kesadaran masyarakat meningkat, didukung dengan aktifnya pemerintah dalam menyosialisasikan program 5M serta patroli penegakan protokol kesehatan.

Menurut teori efektivitas, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Dalam konteks ini, Pemkot Surabaya yang mengalokasikan dana APBD 2020 sebesar Rp. 136 M dinilai efektif dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, khususnya pada bulan September hingga November 2020. Efektivitas kebijakan ini tercermin dalam pencapaian rasio efektivitas yang rendah, yang menunjukkan bahwa tujuan pengendalian penyebaran virus tercapai. Fokus pada outcome (hasil) menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya berhasil menekan laju penyebaran COVID-19 dengan tingkat efektivitas yang tinggi.

Namun, kebijakan refocussing anggaran juga membawa dampak pada beberapa sektor, termasuk penundaan proyek pembangunan infrastruktur, peningkatan tingkat pengangguran terbuka, melemahnya daya beli masyarakat, serta penurunan pendapatan pada berbagai tingkatan ekonomi. Kendati demikian, kebijakan refocussing tetap memberikan kontribusi positif dalam upaya penanganan pandemi di Kota Surabaya.

2. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemkot Surabaya dalam melakukan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020, secara keseluruhan dapat dinilai cukup efektif, terutama pada periode September hingga November. Berdasarkan data LKPJ Walikota Surabaya dan laporan Dinas Kesehatan Daerah, refocussing sebesar Rp. 136 M yang merupakan 3% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya diperkuat dengan dana tambahan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, serta kontribusi masyarakat dan CSR. Total anggaran mencapai Rp. 819 M, yang merupakan 20% dari PAD, dan digunakan untuk berbagai program penanganan COVID-19, termasuk penyediaan alat pelindung diri (APD), tes massal, serta bantuan sosial.

Pada awal penyebaran COVID-19 di Surabaya, tingkat efektivitas kebijakan refocussing masih tergolong tidak efektif dengan persentase efektivitas yang tinggi, yaitu di atas 100% pada bulan April hingga Juni. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat pada awal pandemi merupakan salah satu faktor utama penyebaran virus yang cepat (Haryanto, 2020). Masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan menjaga jarak, yang menyebabkan jumlah pasien positif terus meningkat. Studi serupa yang dilakukan oleh Herdiansyah et al. (2020) juga menemukan bahwa kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat menentukan keberhasilan kebijakan pengendalian COVID-19.

Pada bulan Juli, jumlah pasien mulai menurun, dan efektivitas kebijakan refocussing mencapai 86,63%, yang tergolong cukup efektif. Pada bulan Agustus, peningkatan kembali terjadi,

namun mulai bulan September hingga November, tingkat efektivitas semakin meningkat dengan rasio di bawah 80%, yang tergolong efektif. Pencapaian tingkat efektivitas yang sangat baik pada bulan November (59,93%) sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sosialisasi yang intensif mengenai protokol kesehatan dan pelibatan TNI-Polri dalam patroli kepatuhan protokol kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (Rahmawati, 2021).

Dalam konteks efektivitas kebijakan, teori efektivitas menyatakan bahwa semakin besar kontribusi suatu kebijakan terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori tersebut, di mana kontribusi refocussing anggaran Pemkot Surabaya berhasil menekan laju penyebaran COVID-19 pada bulan-bulan terakhir tahun 2020. Penelitian lain oleh Mardiana et al. (2021) juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang efektif, khususnya pada sektor kesehatan, berperan penting dalam pengendalian pandemi.

Namun, dampak refocussing ini tidak terlepas dari efek samping pada sektor lain, seperti tertundanya proyek infrastruktur dan melemahnya ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahma (2021) yang menunjukkan bahwa penundaan proyek pemerintah akibat refocussing anggaran selama pandemi memiliki dampak negatif pada perekonomian lokal. Walaupun demikian, kebijakan ini tetap dinilai sebagai langkah penting untuk penanganan pandemi di Kota Surabaya, sesuai dengan hasil penelitian oleh Santoso (2020) yang menekankan pentingnya prioritas anggaran untuk penanganan krisis kesehatan di masa pandemi.

Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung pandangan bahwa refocussing anggaran yang dilakukan Pemkot Surabaya merupakan langkah yang cukup efektif dalam menekan laju penyebaran COVID-19, terutama setelah adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan intensifikasi sosialisasi protokol kesehatan.

Kesimpulan

Walikota Surabaya melakukan *refocussing* anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp.136.246.514.992,- yang difokuskan pada sektor kesehatan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, angka ini masih ditambah dari bantuan CSR Rp. 60M, bantuan Provinsi sebesar 49,657M, bantuan Pemerintah Pusat Rp.552,8 M. Dalam menganalisis tingkat efektivitas kebijakan *refocussing* APBD 2020 untuk penanganan covid-19 pada tiga bulan pertama pada awal penyebaran covid-19 (April-Juni) tingkat efektivitasnya diatas 100% sehingga kriterianya tergolong tidak *efektif*, ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien positif covid-19 setiap bulannya. Hal ini disebabkan banyak faktor, *Pertama*, kesadaran warga akan bahaya covid-19 masih rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang enggan memakai masker dalam beraktivitas setiap hari, berkerumun di kedai kopi/angkringan tanpa jarak. Karena banyaknya kasus covid-19 yang ditemukan pada bulan Juni 2020 sejumlah 3.320 pasien, kota

Surabaya dikategorikan sebagai zona merah tua. Pada bulan Juli 2020 jumlah pasien Covid-19 cukup melandai sejumlah 2876 pasien dengan kriteria yang *cukup efektif* sebesar 86,63%. Pada tiga bulan berikutnya (September-November 2020) terjadi jumlah penurunan pasien dan tingkat efektivitas secara berturut-turut 63,53% pada bulan September 2020, 73,38% pada bulan Oktober 2020, sehingga tingkat efektivitas keduanya tergolong *efektif*, bahkan pada bulan November 2020 menjadi bulan dengan tingkat efektivitasnya paling kecil sebesar 59,93% (sangat efektif). Adapun dampak kebijakan *refocussing* APBD 2020 kota Surabaya dalam penanganan covid-19 antara lain: Program pembangunan infrastruktur yang tertunda, Tingkat pengangguran terbuka meningkat, Melemahnya daya beli masyarakat, Pendapatan masyarakat yang menurun, Ekonomi melemah pada segala tingkatan.

Referensi

- Anwar, C., Yunita, S., & Tina, M. B. (2012). Analisis Pengguna Anggaran Biaya Administrasi Umum dan Efisiensi Terhadap Peningkatan Kinerja Supervisor (Studi Empiris pada PT. Lautan Teduh Interniaga Bandar Lampung).
- Grediani, E., & Sugiri, S. (2010). Pengaruh Tekanan Ketaatan dan Tanggung Jawab Persepsian Pada Penciptaan Budgetary Slack. Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Haryanto, T. (2020). Peran Kesadaran Masyarakat dalam Pengendalian Pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123-132.
- Herdiansyah, H., Nugraha, R., & Santoso, P. (2020). Evaluasi Kesadaran Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan di Awal Pandemi COVID-19. *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 5(1), 10-25.
- Iskandar, Z. (2020). Pengelolaan Anggaran Daerah untuk Penanganan COVID-19 di Jawa Timur. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 12(3), 89-102.
- Irsutami, P. (2014). Penyusunan Anggaran Discretionary Expenses (Studi Empiris pada PT Anshun Joyful T & T). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 2(2).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kurniawan, A., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Fiscal Stress, Varians Anggaran, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Mardiana, I., Kusumawati, W., & Putri, A. (2021). Pengaruh Alokasi Anggaran Terhadap Pengendalian Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(4), 56-70.
- Mardiasmo. (2002). Efisiensi dan Efektivitas. Andi: Jakarta.
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik (Cetakan Pertama). UII Press: Yogyakarta.

- Prasetyo, B. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengendalian COVID-19 di Kota-Kota Besar di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 100-115.
- Rahma, F. (2021). Dampak Kebijakan Refocussing Anggaran terhadap Perekonomian Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 201-214.
- Rahmawati, D. (2021). Peran Patroli Kepatuhan Protokol Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(3), 85-98.
- Santoso, A. (2020). Analisis Prioritas Anggaran di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 9(1), 33-49.
- Siregar, M. (2020). Refocussing Anggaran dan Dampaknya terhadap Sektor Kesehatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan*, 6(1), 45-60.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-19). Alfabeta: Bandung.
- Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020). Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data Sebagai Vaksin Socio-digital? *Jurnal UKP, Fakultas FISIP*.
- Wahyudi, D. (2021). Penerapan Refocussing Anggaran APBD dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan*, 17(1), 121-134.